

Policy Brief

OPTIMALISASI PERAN PENTAHELIX UNTUK MENGAKSELERASI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI DI YOGYAKARTA

Oleh: Mutiara T P L Kusuma, Salwa Kamilia, Lily Arsanti Lestari

Ringkasan eksekutif

Terlepas dari capaian yang telah diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta dalam hal pengendalian prevalensi *stunting*, penguatan intervensi gizi masih terus dilakukan mengingat pemerintah Provinsi DI Yogyakarta memiliki visi untuk mencapai target *zero stunting* sebagai bagian dari komitmen penjaminan hak dasar setiap anak. Kajian di berbagai negara menunjukkan bahwa *stunting* hanya dapat ditangani secara optimal melalui kolaborasi, koordinasi dan konvergensi intervensi yang multisektoral. Oleh karena itu penguatan kolaborasi, peran, dan kontribusi elemen *pentahelix* yang didalamnya meliputi unsur pemerintah daerah, akademisi dan peneliti, pelaku usaha, media, dan kelompok masyarakat merupakan hal yang esensial untuk memastikan pendekatan multisektoral tersebut. Kolaborasi ini perlu dikembangkan dalam suatu sistem jejaring yang lebih formal dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Lebih jauh lagi, untuk memastikan agar setiap unsur *pentahelix* yang ada dapat memaksimalkan peran dan memberikan kontribusi yang signifikan, keberadaan suatu forum dengan kanal ilmu pengetahuannya menjadi hal yang penting. Forum dan kanal ilmu pengetahuan ini dapat menjadi wahana komunikasi, sarana berbagi ilmu dan pengalaman, serta media belajar untuk memperdalam pemahaman mengenai intervensi *stunting* yang berbasis bukti dan kebutuhan masyarakat.

Pendahuluan

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang dialami anak usia di bawah dua tahun (baduta), yang ditandai dengan pertumbuhan panjang atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. *Stunting* menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius karena konsekuensi jangka panjangnya terhadap pembangunan dan masa depan bangsa¹. Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021 menunjukkan bahwa jumlah balita yang mengalami *stunting* di Provinsi DI Yogyakarta adalah 17.3%; angka ini menempatkan Provinsi DIY sebagai provinsi dengan

angka *stunting* terendah nomor tiga di Indonesia². Namun, capaian penurunan prevalensi balita *stunting* tersebut belum merata untuk seluruh wilayah Provinsi DI Yogyakarta³.

Data dari berbagai riset menunjukkan bahwa *stunting* disebabkan oleh berbagai faktor baik yang bersumber dari permasalahan asupan gizi, kesehatan ibu dan anak, akses layanan kesehatan yang memadai, sanitasi dan akses air bersih maupun isu sosial ekonomi lainnya⁴. Oleh karena itu, pendekatan untuk memecahkan masalah *stunting* perlu dilaksanakan secara holistik dan multisektoral. Upaya percepatan penurunan *stunting* memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat, media, dunia usaha, akademisi, dan pemerintah daerah. Pelaksanaan konvergensi dan kolaborasi penurunan *stunting* telah tertuang dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*⁵. Agar kolaborasi ini berjalan baik, diperlukan pemahaman, sikap, persepsi dan penerimaan yang sama akan isu *stunting* di antara seluruh elemen *pentahelix* yang terlibat.

Hasil/Permasalahan

Penguatan program percepatan penurunan *stunting* dapat dicapai dengan sinergi kelima unsur *pentahelix*. Berdasarkan hasil analisa *stakeholder* terhadap peran masing-masing unsur *pentahelix* dalam upaya penurunan *stunting*, ada beberapa masalah yang masih perlu diatasi:

1. Pemerintah

Kebijakan pemerintah daerah masih dirasa normatif, terbatas, serta memiliki target penurunan *stunting* yang belum “agresif”. Penyusunan target juga belum disertai dengan penyusunan target yang lebih detail di sisi intervensi maupun penyesuaian di tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan konteks yang ada di masing-masing daerah. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam sistem *data sharing*. Beberapa program yang dijalankan juga masih memiliki skala yang terbatas, belum mempertimbangkan bukti ilmiah yang ada serta aspek keberlanjutan manfaat.

2. Akademisi

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang sejalan dengan *stunting* sudah cukup banyak dilakukan, namun diseminasinya masih terbatas pada jurnal dan pertemuan ilmiah, sehingga belum memberikan banyak pengaruh terhadap pembuatan kebijakan dan program yang berbasis bukti. Kolaborasi dosen dan mahasiswa berpotensi besar dalam meningkatkan cakupan implementasi program, pemantauan serta evaluasi dampaknya terhadap masyarakat.

3. Dunia Usaha

Beberapa pelaku usaha di wilayah Provinsi DI Yogyakarta telah mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan *stunting* melalui aktivitas *corporate social responsibility*. Namun, skala dan keberlanjutannya masih terbatas. Di sisi lain, belum ada pemetaan yang komprehensif atas potensi keterlibatan dunia usaha, belum ada panduan yang jelas serta umpan balik yang diberikan yang memadai bagi para pelaku usaha. Terkait upaya penurunan *stunting*, pelaku usaha juga memiliki peran dalam peningkatan status gizi dan kesehatan pekerja wanitanya

melalui pemenuhan hak dan fasilitas kesehatan pekerja, yang secara langsung akan berpengaruh pada kesehatan bayi dan anaknya.

4. Komunitas

Kelompok komunitas dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dapat didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah, kelompok penggerak di masyarakat seperti kader dan pendamping masyarakat serta anggota masyarakat umum. Kelompok ini umumnya terkendala dari sisi alur kerjasama dengan pemerintah dan mitra lainnya terkait penurunan *stunting* masih belum memiliki panduan yang jelas. Kemampuan tenaga penggerak di masyarakat masih terbatas diikuti dengan sistem insentif yang belum memadai yang berpotensi memengaruhi kualitas kerjanya.

5. Media

Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengarusutamaan isu *stunting*, mendorong adopsi perilaku hidup bersih sehat dan penerimaan masyarakat terhadap intervensi *stunting*. Pembuatan konten media sosial sebagai bentuk promosi kesehatan masih cukup rendah meskipun media sosial ini berpotensi besar dalam menjangkau dukungan dari masyarakat terhadap program *stunting* khususnya pada kelompok usia muda. Banyaknya informasi yang beredar di media juga perlu dipastikan akurasinya agar tidak menyesatkan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan

Agar keterlibatan unsur *pentahelix* dalam program percepatan penurunan *stunting* dapat memberikan hasil yang maksimal, maka diperlukan penguatan strategi sebagai berikut:

1. Pembentukan konsorsium atau forum peduli *stunting*

Tantangan penurunan *stunting* di Provinsi DI Yogyakarta membutuhkan pendekatan yang bersifat multidisiplin dan multisektoral. Keberadaan forum peduli *stunting* yang memwadahi keterlibatan berbagai pihak seperti akademisi dan peneliti, pemerintah daerah, kelompok komunitas, pelaku usaha, dan media menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh pihak yang berkepentingan dan berpotensi dalam penyelesaian permasalahan ini memiliki kesadaran, perspektif, dan penerimaan yang sama akan *stunting* dan intervensinya. Agar seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mendapatkan pengalaman, forum ini perlu disertai dengan suatu agenda pertemuan rutin yang membahas kemajuan, praktik baik, tantangan dan pembelajaran dalam penanganan *stunting* baik yang berasal dari dalam Provinsi DI Yogyakarta maupun dari luar daerah sebagai referensi pembandingan. Melalui konsorsium ini juga dapat dilakukan pemetaan cakupan kegiatan dan potensi kontribusi dari pihak-pihak yang lebih baik.

2. Pembentukan dan pemeliharaan kanal ilmu pengetahuan

Memiliki pemahaman, penerimaan, dan perspektif yang sama akan urgensi *stunting* dan intervensi penanganannya merupakan kunci dalam memastikan kolaborasi antar elemen *pentahelix* berjalan dengan baik. Pengembangan dan pemeliharaan kanal ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan informasi terkait *stunting* yang akurat perlu dilakukan. Kanal ilmu pengetahuan ini juga dapat berfungsi sebagai media belajar dan sumber pemberitaan yang berbasis bukti. Di sisi lain, pemanfaatan media sosial sebagai salah satu kanal ilmu pengetahuan yang mengikuti perkembangan teknologi

komunikasi digital saat ini, memiliki potensi besar dalam menjangkau kelompok usia muda agar memiliki kesadaran gizi yang baik.

3. Penyusunan petunjuk teknis atau regulasi operasional bagi pihak-pihak

Kolaborasi multisektor dan konvergensi intervensi *stunting* menuntut suatu kejelasan sistem dan mekanisme kerja antar pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Berikut adalah rincian petunjuk teknis dan regulasi operasional yang dibutuhkan untuk optimalisasi kolaborasi *pentahelix* dalam penurunan *stunting* di Provinsi DI Yogyakarta:

- a) Penyusunan kebijakan teknis mengenai *data sharing* antar organisasi perangkat daerah, serta dengan pihak-pihak dalam forum peduli *stunting* dengan tetap mengedepankan asas manfaat, kerahasiaan dan perlindungan masyarakat. Kebijakan ini dapat mendorong keterbukaan informasi, optimalisasi pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan program dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Kebijakan ini juga dapat mendorong terciptanya komunikasi yang lebih baik dan terbuka antara pihak-pihak yang terlibat dalam penurunan *stunting*.
- b) Penyusunan alur dan mekanisme inisiasi kerjasama antar lembaga sehingga memudahkan berbagai pihak yang ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau unsur *pentahelix* lainnya. Mekanisme yang perlu disusun setidaknya meliputi jalur komunikasi, prosedur kerja, pendanaan, pelaporan kegiatan dan imbal balik atau kebermanfaatannya bagi pihak-pihak yang terlibat
- c) Penyusunan skema insentif yang lebih baik bagi tenaga penggerak di masyarakat seperti kader, kader pembangunan manusia, dan tenaga pendamping lainnya yang berperan besar dalam memastikan penerimaan program *stunting* di masyarakat. Skema ini perlu mempertimbangkan asas kelayakan terhadap beban kerja agar dapat mempertahankan motivasi kerja di antara tenaga penggerak serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketersediaan anggaran. Selain mekanisme insentif, perlu dikembangkan juga mekanisme yang memastikan regenerasi dari tenaga penggerak tersebut di masyarakat.
- d) Penyusunan regulasi operasional bagi korporasi untuk mendorong pemenuhan hak dan fasilitas kesehatan bagi karyawan, khususnya karyawan wanita dengan mempertimbangkan kemampuan korporasi tersebut.

Daftar Pustaka

1. Sekretariat Wakil Presiden Indonesia. 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*) – Ringkasan [internet]. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 2017 [dikutip 7 November 2022]. Tersedia dari: <https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Ringkasan%20Stunting.pdf>
2. Kemenkes RI. Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 [internet]. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021 [dikutip 7 November 2022]. Tersedia dari: <https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>

3. Dinas Kesehatan DIY. Profil Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, 76. Yogyakarta; 2021.
4. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting). 2 ed. Indonesia: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia; 2018.
5. Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta; 2021.